

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik*, Ctk.Keempat, Mizan, Bandung, 1995.
- Afan gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998.
- Desi Fernanda, *Etika Organisasi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Makassar, 2018.
- Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Prenada Media, Depok, 2016.

- Joko J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi Sistem dan Problema penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum* IND-HILL-CO, Jakarta 1986.
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Moh.Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 2000.
- _____, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Muntoha, *Fiqh Siyasah*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1998.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik*, Ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm.308.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S.F.Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara Netralitas Netralitas Pegawai Negeri dalam kehidupan politik di Indonesia*, FH UII, Yogyakarta, 1998.
- Sri Hartini dan tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.

Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997.

Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

PUTUSAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

MAKALAH DAN JURNAL:

Bagir Manan, di kutip dari *Jurnal Konstitusi* PSHK-FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.15

Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas”, Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018.

DATA ELEKTRONIK:

Agus Susilo, ‘BPN Laorkan Deklarasi 31 Kepala Daerah ke Bawaslu’ terdapat dalam <https://semaranginside.com/bpn-laporkan-deklarasi-31-kepala-daerah-ke-bawaslu/> diakses pada tanggal 9 mei 2019 pada pukul 20.33 WIB

Angling Adhitya, ‘BPN Protes Bawaslu Soal Tak Ada Pelanggaran Deklarsi Ganjar Cs Pro-Jokowi’ terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4443236/bpn-protos-bawaslu-soal-tak-ada-pelanggaran-deklarasi-ganjar-cs-pro-jokowi> diakses pada tanggal 11 mei 2019 pada pukul 10.15 WIB

Kewenangan Bawaslu <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban> diakses pada tanggal 18 juli 2019 pada pukul 20.15 WIB

Lisye Sri, “Mendagri soal Ganjar dkk Deklarasi Pro-Jokowi Sudah Sesuai Aturan” terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4442803/mendagri-soal-ganjar-dkk-deklarasi-pro-jokowi-sudah-sesuai-aturan> diakses pada tanggal 11 mei 2019 pada pukul 14.50 WIB

Nazar Nurdin, “Bawaslu Putuskan Deklarasi ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan” terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2019/02/23/14514031/bawaslu->

[putuskan-deklarasi-ganjar-pranowo-dan-31-kepala-daerah-langgar](#) diakses

pada tanggal 9 mei 2019 pada pukul 21.00 WIB

“Pandangan refly Harun Soal Kepala Daerah yang Deklasikan Dukungan ke Capres” terdapat dalam

[http://jateng.tribunnews.com/2018/10/19/pandangan-refly-harun-soal-](http://jateng.tribunnews.com/2018/10/19/pandangan-refly-harun-soal-kepala-daerah-yang-deklarasikan-dukkungan-ke-capres)

[kepala-daerah-yang-deklarasikan-dukkungan-ke-capres](#) diakses pada

tanggal 11 mei 2019 pada pukul 14.25 WIB

